

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai dimensi, seperti perubahan dalam struktur sosial, perubahan sikap hidup masyarakat, dan perubahan dalam kelembagaan nasional. Di samping itu, pembangunan juga mencakup perubahan ekonomi serta upaya pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pengentasan kemiskinan.² Menurunkan tingkat kemiskinan merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan nasional.³

Berhasil atau gagalnya pembangunan ekonomi dari suatu wilayah maupun suatu negara dapat dilihat dari perubahan tingkat kemiskinannya.⁴ Kemiskinan adalah keadaan hidup seseorang yang mengacu pada kurangnya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya dan tidak bisa menikmati kehidupannya mulai dari pekerjaan, kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pendapatan yang tinggi maupun taraf hidup yang

² Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 2.

³ Hapsari Wiji Utami dan Siti Umajah Masjkuri, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*. Vol. 28 No. 2, 2018, hal. 106.

⁴ Novegya Ratih Primandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 16 No. 1, 2018, hal. 1.

layak.⁵ Saat ini masalah kemiskinan adalah salah satu persoalan yang sebagian besar masyarakat dunia hadapi, terutama negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan.⁶

Grafik 1.1
Jumlah (Juta Orang) dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2012-2022



Sumber: BPS Indonesia, 2023

Berdasarkan grafik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 persentase kemiskinan naik kemudian menurun hingga tahun 2019. Namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian di Indonesia awal tahun 2020 yang lesu dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah mengenai penerapan Pembatasan Sosial

⁵ Novegya Ratih Primandari dan Andri Irawan, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Selama Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”, *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 7 No. 3, 2022, hal. 14.

⁶ Wyanet Putri Alisha dan Yulhendri, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat”, *Jurnal Ecogen*. Vol. 4 No. 4, 2021, hal. 581.

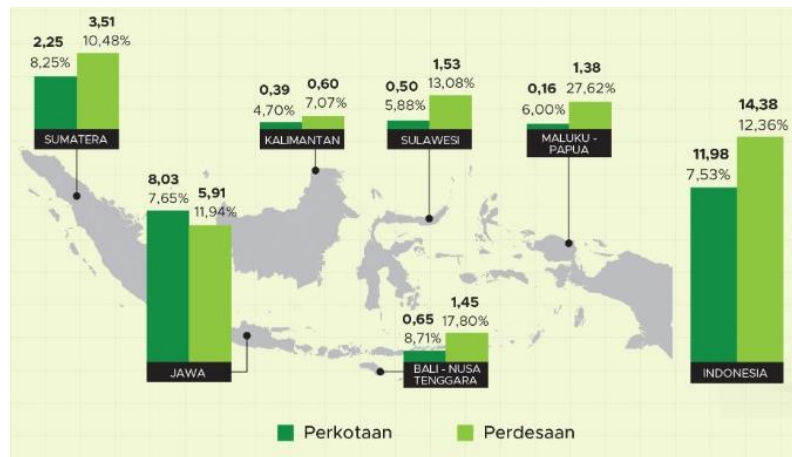
Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada bulan April menyebabkan perubahan bagi perekonomian di Indonesia yang cukup signifikan. Berbagai kegiatan ekonomi mulai menghadapi kendala karena adanya pembatasan, berbagai macam hambatan yang dialami dalam kegiatan produksi mulai dari proses produksi, distribusi hingga kegiatan operasional yang lainnya. Karena itu, banyak perusahaan dan juga industri mengalami kesulitan sehingga pengoperasian terpaksa harus dihentikan, yang berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja tentu akan meningkatkan persentase pengangguran dan kemungkinan besar juga akan meningkatkan angka kemiskinan.⁷

Terdapat tiga ciri yang sangat terlihat pada kemiskinan di Indonesia.⁸ Pertama, sejumlah besar rumah tangga berada dalam lingkup garis kemiskinan nasional, menyebabkan risiko kemiskinan bagi banyak penduduk, meskipun mereka tidak tergolong miskin. Kedua, pengukuran kemiskinan didasarkan pada perolehan pendapatan masyarakat. Banyak orang yang tergolong miskin karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Ketiga, mengingat sangat luas dan banyaknya ragam wilayah Indonesia, ciri mendasar pada kemiskinan di Indonesia adalah adanya perbedaan setiap daerah.

⁷ *Ibid.*, hal. 13.

⁸ Ali Khomsan, dkk., *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 6.

Gambar 1.1
Jumlah (Juta Orang) dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Pulau di Indonesia



Sumber: BPS Indonesia, 2023

Jika dilihat pada gambar yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, yang menempati urutan pertama pulau dengan persentase penduduk miskin tertinggi per-September 2022 yaitu ada pada Pulau Jawa. Terdapat 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa, antara lain: Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Persentase tingkat kemiskinan berdasarkan provinsi yang ada di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Penduduk Miskin (%)
DKI Jakarta	4,61
Jawa Barat	7,98
Jawa Tengah	10,98
DI Yogyakarta	11,49
Jawa Timur	10,49
Banten	6,24

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persentase penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per-September 2022 mencapai 11,49%, kemudian Provinsi Jawa Tengah dengan persentase 10,98%. Peneliti tertarik untuk mengambil tempat penelitian di Provinsi Jawa Tengah karena saat ini pengurangan kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 576 kecamatan dan 8.563 desa/kelurahan.

Berikut merupakan data tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahun 2018-2022, yaitu:⁹

Tabel 1.2
Data Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022

Tahun	Penduduk Miskin (%)
2018	11,32
2019	10,80
2020	11,41
2021	11,79
2022	10,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Dimana di tahun 2019 tingkat kemiskinan sudah menurun namun terjadi kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Kemudian pada tahun 2022 tingkat kemiskinan kembali menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan serius yang tengah dihadapi sehingga pemerintah

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam <https://jateng.bps.go.id> yang diakses pada 27 Maret 2023.

Provinsi Jawa Tengah masih berusaha untuk menjalankan berbagai program sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.¹⁰

Pada teori lingkaran setan kemiskinan (*various circle of poverty*) oleh Nurkse, kemiskinan diawali karena adanya ketidaksempurnaan pasar sehingga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan berdampak pada rendahnya pendapatan. Pendapatan yang rendah akan berpengaruh pada kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mampu terpenuhi semua.¹¹ Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Faktor yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur perekonomian dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi bisa menunjukkan seberapa besar kegiatan perekonomian dapat mewujudkan tambahan pendapatan bagi masyarakat di wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.¹² Pada tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto dalam kurun waktu tertentu baik secara riil maupun nominal.¹³

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁰ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah", *Equilibrium*. Vol. 10 No. 2, 2021, hal. 122.

¹¹ Mohammad Nuh dan Suhartono Winoto, *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 54.

¹² Nana Alfiana, dkk., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung", *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*. Vol. 8 No. 2, 2022, hal. 155.

¹³ Wyanet Putri Alisha dan Yulhendri, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi...", hal. 583.

Tabel 1.3
Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)
2018	5,3
2019	5,36
2020	-2,65
2021	3,33
2022	5,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Jawa Tengah juga mengalami fluktuasi yaitu terjadi kenaikan pada tahun 2019 dan kemudian menurun pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan 2022 persentase naik kembali. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk dapat menurunkan angka kemiskinan maka harus meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diukur dari peningkatan besarnya pendapatan yang diperoleh dari suatu daerah pada waktu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁵

Faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan selanjutnya yaitu upah minimum.¹⁶ Upah minimum adalah upah yang ditetapkan minimum dalam suatu wilayah. Upah minimum yang dibayarkan merupakan upah terendah yang diizinkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Jadi, upah minimum yaitu upah terendah yang dibayarkan oleh suatu perusahaan di wilayah

¹⁴ Desrini Ningsih dan Puti Andiny, "Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 58.

¹⁵ Nana Alfiana, dkk., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...", hal. 155.

¹⁶ Syahrur Romi dan Etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi", *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Vol. 7. No. 1, 2018, hal. 1.

tertentu.¹⁷ Berikut ini data upah minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022 yaitu:

Tabel 1.4
Data Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022

Tahun	Upah Minimum Provinsi (rupiah)
2018	1.486.065
2019	1.605.396
2020	1.742.015
2021	1.798.979
2022	1.812.935

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, upah minimum Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Tingkat Upah Minimum Regional memiliki hubungan tersendiri terhadap kemiskinan yang terjadi.¹⁸ Meningkatnya upah minimum pekerja akan merangsang semangat mereka untuk bekerja dan dapat meningkatkan efisiensi kerja, sehingga daya beli para pekerja akan meningkat.¹⁹ Secara teoritis jika upah minimum regional naik sehingga kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhannya meningkat, maka berdampak pada jumlah penduduk miskin yang dapat berkurang. Namun, tidak jarang adanya kenaikan upah minimum regional terjadi untuk menyesuaikan kenaikan harga komoditas yang ada di pasar. Jika hal ini terjadi, maka daya beli pekerja tidak meningkat sehingga tidak ada efek dari

¹⁷ Rizki Maulana Prasetyo, "Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021", *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 3 No. 1, 2022, hal. 35.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 34.

¹⁹ Erliza Millenia Putri dan Dewi Zaini Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 10 No. 2, 2021, hal. 107.

kenaikan upah minimum terhadap penurunan kemiskinan.²⁰ Peningkatan upah minimum juga dapat menyebabkan kemiskinan meningkat. Hal ini disebabkan karena produsen lebih memilih menggunakan teknologi untuk memaksimalkan hasil produksi industri, maka pertumbuhan tenaga kerja menjadi lebih sedikit sehingga kemiskinan meningkat akibat bertambahnya jumlah pengangguran.²¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pertumbuhan ekonomi dapat mewujudkan seberapa besar peningkatan pendapatan sehingga bisa memberikan dampak pada tingkat kemiskinan.
2. Upah minimum regional yang diterima dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan.
3. Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami peningkatan kemudian terjadi penurunan, namun kemiskinan masih perlu diwaspadai agar tidak memicu kembalinya peningkatan kemiskinan.

²⁰ Syafri dan Putri Aulia Febrianti, “Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Banten”, *Metrik Serial Humaniora dan Sains*. Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 29.

²¹ Nadia Islami dan Ali Anis, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 1 No. 3, 2019, hal. 940.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah upah minimum regional berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menguji pengaruh upah minimum regional terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diperoleh adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian ilmu di bidang ekonomi makro khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan juga kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan strategi dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perbendaharaan kepustakaan di FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan yang memberikan kemudahan dalam penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan hanya menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum regional (X2). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah kemiskinan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian digunakan untuk mengatasi ketidakjelasan dan membatasi cakupan penelitian. Batasan tersebut tidak hanya mencakup keterbatasan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan biaya yang dipakai pada penelitian, tetapi juga mencakup keterbatasan variabel makroekonomi yang berperan sebagai indikator yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Maka dari itu, penelitian ini terfokus pada variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum regional yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022.

G. Penegasan Istilah

Peneliti memberikan gambaran mengenai pengertian dari judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan” sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang ditarik dari kesimpulan kajian teori terhadap variabel-variabel yang diteliti.

- a. Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang melibatkan kegiatan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa.²²
- b. Upah Minimum Regional. Upah minimum merupakan suatu penghasilan minimum (terendah) bulanan yang berupa imbalan dari

²² Nana Alfiana, dkk., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...”, hal. 157.

pemberi kerja kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang akan atau sudah dilakukan dan dinyatakan atau dihargai dalam bentuk uang yang ditentukan berdasarkan kesepakatan atau ketentuan yang sah dan dibayar berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja termasuk tunjangan bagi pekerja itu sendiri maupun keluarganya.²³

- c. Kemiskinan adalah kondisi di mana pendapatan rendah atau bahkan tidak ada, dan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi.²⁴

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang dinyatakan dalam definisi konsep) secara operasional, praktis, dan nyata dalam ruang lingkup objek penelitian/objek yang diteliti.

- a. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan produksi barang maupun jasa yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan.
- b. Upah Minimum Regional yaitu suatu standar minimum yang dibayarkan bulanan oleh pengusaha kepada karyawan di lingkungan kerja. Dimana pada penelitian ini didasarkan pada upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

²³ Muhammad Sabyan dan Rina Widyanti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Kota Jambi", *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*. Vol. 8 No. 3, 2022, hal. 312.

²⁴ Nana Alfiana, dkk., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah...", hal. 158.

- c. Kemiskinan yaitu suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengeluarannya di bawah garis kemiskinan (pada satuan persen), dan data diambil dari Badan Pusat Statistik.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.